

Pengaruh ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang di Indonesia

Budi Mulia Kurniawan, Ameliya Silaning Utami

Universitas Esa Unggul

budiimulia@student.esaunggul.ac.id, ameliyautami@student.esaunggul.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) and institutional ownership on tax avoidance practices in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. This research employed a quantitative approach using panel data regression analysis. The sample was selected through a purposive sampling technique, resulting in 15 mining companies with a total of 60 firm-year observations. The research data were obtained from annual reports, financial statements, sustainability reports, and ESG scores provided by the ESGI Dataset Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS), Universitas Airlangga. The findings indicate that ESG and institutional ownership simultaneously have a significant effect on tax avoidance. Partially, ESG has a positive and significant effect on tax avoidance, suggesting that companies with higher ESG implementation may still engage in legal tax planning strategies to improve tax efficiency. Meanwhile, institutional ownership has no significant effect on tax avoidance, indicating that institutional investors have not yet functioned effectively as a monitoring mechanism in influencing corporate tax policies. These findings provide empirical evidence that stronger ESG implementation does not necessarily reduce tax avoidance practices, while institutional ownership alone is insufficient to constrain tax avoidance behavior among mining companies in Indonesia.

Keywords: *Environmental, Social, and Governance (ESG); Institutional Ownership; Tax Avoidance; Mining Companies; Panel Data Regression.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) dan kepemilikan institusional terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 15 perusahaan dengan total 60 observasi. Data penelitian berasal dari laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta ESG Score dari ESGI Dataset Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Universitas Airlangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ESG dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat implementasi ESG yang tinggi masih dapat melakukan strategi efisiensi pajak secara legal. Sementara itu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga belum mampu berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam memengaruhi kebijakan perpajakan.

perusahaan. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi ESG belum tentu diikuti dengan penurunan praktik penghindaran pajak, sedangkan keberadaan investor institusional belum cukup kuat untuk membatasi perilaku tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

Kata Kunci: Environmental, Social, and Governance (ESG); Kepemilikan Institusional; Tax Avoidance; Perusahaan Pertambangan; Regresi Data Panel.

PENDAHULUAN

Saat ini sektor perpajakan semakin penting bagi negara karena kontribusinya yang besar tidak hanya sebagai sumber penerimaan namun juga mendukung proses redistribusi pendapatan, meningkatkan daya saing hingga sebagai instrumen dalam pemulihan ekonomi saat pandemi (Darussalam et al., 2022, hlm.1). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2024, diketahui bahwa jumlah pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pendapatan perpajakan dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp1.647,78 triliun menjadi sebesar Rp2.850,61 triliun di tahun 2024 (Menteri Keuangan, 2025). Dari jumlah tersebut, penerimaan negara memberikan kontribusi terbesar yakni Rp2.231,839 triliun atau 78,3% dari total penerimaan negara pada tahun 2024. Besarnya kontribusi ini menegaskan bahwa pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda penerimaan dan memenuhi pelayanan kepada masyarakat (Wijaya & Rahayu, 2021, hlm. 19).

Dalam berbagai jenis pungutan pajak, pajak penghasilan badan merupakan komponen penting dalam sistem penerimaan negara di negara berkembang (Mansour & Alomair, 2026). Namun demikian, besarnya potensi penerimaan pajak badan diiringi dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah potensi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (Sopiyana, 2022). Salah satu kasus yang kembali mencuat pada tahun 2019 ialah PT Adaro Energi Tbk yang melakukan dugaan praktik penetapan harga transfer sejak 2009 hingga 2017 lewat anak usaha di Singapura sehingga bisa membayar pajak USD 125.000.000 lebih rendah dari seharusnya yang dibayar di Indonesia (Global Witness, 2019). Urgensi semakin diperkuat oleh laporan dari Tax Justice Network (2025) diketahui bahwa praktik *profit shifting* oleh perusahaan multinasional ke luar Indonesia mencapai US\$72,670.9 juta dengan potensi hilangnya penerimaan pajak mencapai US\$17,627 juta. Temuan ini mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak yang signifikan akibat praktik *corporate tax abuse* dan *profit shifting* perusahaan multinasional ke negara suaka pajak.

Peristiwa tersebut tidak terlepas dari tujuan perusahaan yang ingin mendapatkan laba yang optimal, sehingga muncul kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku (Darussalam et al., 2022, hlm. 313). Penghindaran pajak bukanlah hal yang asing di kalangan wajib pajak dan seringkali menjadi dilema etis karena sifatnya yang legal (Wilda et al., 2023). Perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar

umumnya memiliki peluang yang lebih luas untuk meminimalkan kewajiban pajaknya (Soesetio, 2025). Penelitian oleh Mukhtaruddin, Tanujaya, et al. (2025) menjelaskan bahwa tindakan penghindaran pajak merugikan negara karena dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Lebih lanjut, Sopiya (2022) mengungkapkan bahwa tindakan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan menimbulkan dilema antara kepatuhan formal dan tanggung jawab moral. Dampak dari praktik penghindaran pajak adalah munculnya persoalan etika dan tata kelola perusahaan karena dapat mengurangi kepercayaan publik dan melemahkan fiskal negara dalam jangka panjang (Soesetio, 2025). Dalam konteks ini perusahaan di Indonesia saat ini menghadapi tekanan semakin besar dari investor dan masyarakat untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada laba melainkan juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan prinsip keberlanjutan (Andrianto et al., 2025).

Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan, dampak perubahan iklim dan berbagai permasalahan sosial turut mendorong munculnya konsep keberlanjutan korporasi (*corporate sustainability*) yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas jangka pendek, melainkan juga pada kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas operasionalnya (Mardjono et al., 2024, hlm. 115). Suripno (2025, hlm. 7) mengatakan bahwa perkembangan lanjutan dari *sustainability* adalah munculnya konsep ESG (*Environmental, Social, and Governance*) yang merupakan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. ESG tidak hanya mencerminkan kinerja non-keuangan, tetapi juga merepresentasikan komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis serta proses pengambilan keputusan (Mukhtaruddin, Siahaan, et al., 2025). Kerangka ESG dipandang mampu mempengaruhi berbagai perilaku korporasi, termasuk dalam menentukan strategi perpajakan mengingat implementasi ESG berkaitan erat dengan upaya perusahaan membangun legitimasi, menjaga reputasi, dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan (Mukhtaruddin, Novriansa, et al., 2025). Dengan demikian, ESG bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi keberlanjutan, namun juga berpotensi mempengaruhi keputusan manajerial, termasuk kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Andrianto et al., 2025).

Meskipun secara teoritis ESG dipandang mampu mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih etis dan transparan, hubungan antara ESG dan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam berbagai penelitian empiris (Rosmaryam et al., 2026). Sejumlah penelitian menemukan bahwa ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya ESG dapat menekan praktik penghindaran pajak (Amarna et al., 2025; Andrianto et al., 2025; Hidayat & Zuhroh, 2023; Arieftiara et al., 2025 dan Mukhtaruddin et al., 2026). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa ESG berperan positif terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi

cenderung lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak (Mukhtaruddin et al., 2024; Sastroredjo et al., 2025; Mansour & Alomair, 2026; Mukhtaruddin, Novriansa, et al., 2025; Mukhtaruddin, Siahaan, et al., 2025). Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa peran ESG dalam praktik penghindaran pajak masih bersifat inkonsisten, yaitu ESG dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang menekan perilaku oportunistik, namun di sisi lain juga dapat dimanfaatkan sebagai alat legitimasi untuk mendukung strategi penghindaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan ESG, namun juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan lainnya yang berperan dalam mengawasi tindakan manajemen (Mansour & Alomair, 2026).

Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dipandang berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan adalah kepemilikan institusional (Ayundasari & Septiani, 2025). Menurut penelitian Galuh Adella Lokahita & Sevty Wahiddirani Saputri (2024), kepemilikan institusional dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena adanya potensi konflik kepentingan yaitu ketika investor dari institusi menekan manajemen untuk mengutamakan kinerja finansial demi kepentingan investor. Andrianto et al. (2025) menemukan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sangat beragam, yaitu hasil yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan mengindikasikan bahwa investor institusional belum berfungsi sebagai pemantau kepatuhan pajak yang efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Ayundasari & Septiani (2025) dan Sastrodiharjo & Mukti (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang mengindikasikan bahwa investor institusional mendorong strategi pajak agresif khususnya untuk memaksimalkan pengembalian investasi. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Yulistia et al., (2020), Afrika & Author, (2021), Karlinah et al., (2024) dan Sari & Riantida Simamora, (2025) menyatakan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak negatif artinya kepemilikan kelembagaan yang lebih tinggi meningkatkan intensitas pemantauan sehingga mengekang agresivitas pajak karena masalah reputasi atau hukum.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait pengaruh ESG (*Environmental, Social, and Governance*) terhadap praktik penghindaran pajak karena sebagian penelitian menemukan bahwa ESG mampu menekan praktik *Tax Avoidance*, sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa ESG justru berperan dalam meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Di sisi lain, kepemilikan institusional sebagai mekanisme tata kelola juga menunjukkan hasil yang beragam, baik sebagai mekanisme *monitoring* yang menekan penghindaran pajak maupun sebagai faktor yang mendorong efisiensi pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih mengkaji ESG dan kepemilikan institusional secara terpisah, sehingga belum banyak studi yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model untuk menjelaskan

perilaku penghindaran pajak perusahaan, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya serta masih terbatasnya studi yang mengintegrasikan variabel ESG dan kepemilikan institusional maka diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ini mengkaji perusahaan sektor tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2025 karena karakteristik sektor ini sarat akan eksposur lingkungan dan sosial mulai dari reklamasi lahan pasca tambang, pengelolaan dampak terhadap lingkungan, hubungan dengan masyarakat sekitar dan struktur kepemilikan yang melibatkan investor institusional. Keterbatasan penelitian terdahulu adalah mengkaji ESG dan kepemilikan institusional secara terpisah turut memperkuat perlunya penelitian yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model analisis. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ESG dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas yang efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak atau justru mendorong strategi efisiensi pajak perusahaan dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris berupa bukti terbaru mengenai pengaruh ESG dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam memahami pentingnya implementasi ESG dan tata kelola perusahaan terhadap praktik perpajakan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sektor pertambangan didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor ini merupakan salah satu sektor dengan dampak lingkungan yang signifikan sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi ESG, sekaligus menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak (Cahyati et al., 2023). Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian (Mukhtaruddin et al., 2026).

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode penelitian; (2) perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan (*annual report*), dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara lengkap selama periode penelitian dan (3) perusahaan yang memiliki data kepemilikan institusional dan ESG Score dari ESGI Dataset Center for *Environmental, Social, and Governance Studies* (CESGS) Universitas Airlangga. Perusahaan yang tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Pada

penelitian ini total populasi sejumlah 107 perusahaan diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan sektor pertambangan yang memenuhi kriteria. Sehingga total pengamatan selama tahun penelitian 2021-2024 dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah 60 data observasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel (*panel data regression*) karena data penelitian mencakup dimensi lintas perusahaan (*cross-section*) dan lintas waktu (*time series*) secara bersamaan (Firmansyah et al., 2026). Analisis data panel dipilih karena mampu mengendalikan heterogenitas antar individu perusahaan yang tidak teramati, meningkatkan efisiensi estimasi, serta menghasilkan estimasi yang lebih akurat dibandingkan data *cross-section* maupun *time series* secara terpisah.

Sebelum melakukan estimasi regresi, terlebih dahulu dilakukan pemilihan model estimasi yang paling tepat melalui tiga tahapan pengujian. Pertama, Uji Chow (*Chow Test*) untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Kedua, Uji Hausman (*Hausman Test*) untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Ketiga, Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*) apabila diperlukan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Selain pemilihan model, dilakukan pula serangkaian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews*. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 ESG_{it} + \beta_2 INST_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TA	=	<i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)
ESG	=	<i>Environmental, Social, and Governance</i>
INST	=	Kepemilikan Institusional
<i>i</i>	=	perusahaan
<i>t</i>	=	tahun
β_0	=	konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	=	koefisien regresi
ε	=	<i>error term</i> .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik F pada Gambar 10, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,000001 < 0,05$ dan nilai F-statistic sebesar 18,38490 lebih besar dibandingkan F tabel sebesar 3,16 ($18,38490 > 3,16$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Kepemilikan Institusional (KI) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi penerapan ESG dan tingkat Kepemilikan Institusional dalam perusahaan secara bersama-sama mampu mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Gambar 16, variabel *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,722400 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0005. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dibandingkan t tabel ($3,722400 > 2,002$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0005 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi tidak selalu memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang lebih rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tetap dapat menerapkan strategi efisiensi pajak yang legal (*tax planning*) meskipun telah menunjukkan komitmen terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pada perusahaan sektor pertambangan, implementasi ESG juga membutuhkan investasi yang relatif besar, seperti pengelolaan lingkungan, reklamasi lahan, pengurangan emisi, serta program tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk menjaga efisiensi arus kas tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Temuan ini mendukung *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk efisiensi perpajakan yang masih berada dalam koridor peraturan. Temuan ini juga sejalan dengan Mukhtaruddin, Siahaan, et al. (2025) yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan implementasi ESG sebagai bentuk *reputation shield* atau *moral licensing*, sehingga perusahaan tetap melakukan strategi penghindaran pajak yang legal untuk memperoleh efisiensi kas yang kemudian digunakan dalam mendukung investasi dan program ESG.

Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan prediksi *Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ESG tinggi cenderung mengurangi praktik *Tax Avoidance* untuk menjaga legitimasi dan

kepercayaan para pemangku kepentingan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ESG dan *Tax Avoidance* masih bersifat *mixed results*, sebagaimana dikemukakan oleh (Velte, 2026). Dengan demikian, pada perusahaan sektor pertambangan Indonesia, penerapan ESG belum tentu diikuti dengan penurunan praktik *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* diterima.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Gambar 16, variabel Kepemilikan Institusional (KI) memperoleh nilai t hitung sebesar -1,235024 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2219. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai absolut t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel ($1,235024 < 2,002$) dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,2219 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Koefisien regresi yang bernilai negatif (-0,210216) menunjukkan bahwa peningkatan Kepemilikan Institusional memiliki kecenderungan untuk menurunkan tingkat *Tax Avoidance*, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Artinya, peningkatan kepemilikan institusional belum dapat dijadikan faktor utama yang menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan institusional memiliki kecenderungan untuk menekan praktik *Tax Avoidance*, fungsi pengawasan yang dimiliki investor institusional belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan sektor pertambangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investor institusional kemungkinan lebih berfokus pada pencapaian kinerja keuangan dan peningkatan nilai perusahaan dibandingkan melakukan pengawasan secara langsung terhadap strategi perpajakan yang diterapkan manajemen.

Temuan ini belum sepenuhnya mendukung *Agency Theory* yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan mekanisme tata kelola yang efektif dalam mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan fungsi *monitoring* terhadap manajemen. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan pendapat Sulistiyani & Rizkyana (2025); Sastrodiharjo & Mukti (2024); Karlinah et al. (2024); Khan et al. (2026) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu membatasi praktik *Tax Avoidance* melalui pengawasan yang lebih efektif. Namun demikian, temuan ini sejalan dengan Chen & Li (2025) yang menjelaskan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* masih menunjukkan *mixed results*. Investor institusional tidak selalu menekan praktik penghindaran pajak, tetapi dapat menyesuaikan strategi perpajakan perusahaan agar tetap berada pada tingkat yang dianggap wajar sesuai karakteristik industri dan tujuan perusahaan.

Ditinjau dari sudut pandang *Stakeholder Theory* perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, termasuk investor institusional, tetapi

juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain seperti pemerintah, masyarakat, karyawan, dan lingkungan. Kepemilikan institusional pada dasarnya merupakan representasi kepentingan salah satu kelompok *stakeholders*, namun bukan satu-satunya pihak yang menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Tidak signifikannya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan sektor pertambangan cenderung berupaya menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan secara lebih luas, tidak semata-mata mengikuti preferensi investor institusional. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Mukhtaruddin, Siahaan, et al. (2025) bahwa kemampuan perusahaan menyeimbangkan dan memenuhi kepentingan berbagai kelompok pemangku kepentingan sangat krusial bagi keberlangsungan usaha jangka panjang (*longevity*) dan keberhasilan perusahaan, sehingga keputusan terkait perpajakan lebih banyak dipengaruhi oleh upaya menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan secara keseluruhan, misalnya melalui komitmen terhadap ESG dan kepatuhan regulasi, dibandingkan tekanan langsung dari besarnya proporsi kepemilikan institusional semata. Dengan demikian, keberadaan investor institusional belum cukup menjadi saluran kepentingan *stakeholders* secara menyeluruh dalam mendorong perusahaan untuk menekan praktik penghindaran pajak.

Dari perspektif *Legitimacy Theory* yang dipopulerkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) legitimasi perusahaan di mata masyarakat diperoleh melalui kesesuaian aktivitas perusahaan dengan norma dan harapan sosial yang berlaku, yang pada umumnya ditunjukkan melalui pengungkapan dan pelaporan yang bersifat terbuka kepada publik, seperti pelaporan ESG, dan bukan melalui tekanan dari struktur kepemilikan saham. Tidak berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa dorongan perusahaan untuk menjaga legitimasi di hadapan masyarakat lebih banyak berasal dari upaya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung kepada publik, sebagaimana dijelaskan oleh Ariefiara et al. (2025) dan Rosmaryam et al. (2026) bahwa pelaporan ESG berfungsi sebagai alat legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan investor. Investor institusional, meskipun memiliki kepentingan atas kinerja perusahaan, tidak selalu berperan sebagai pihak yang mendesak perusahaan untuk mematuhi norma sosial terkait perpajakan, sehingga fungsi pengawasannya belum cukup kuat untuk menjadi saluran legitimasi bagi perusahaan dalam mengelola kebijakan pajaknya. Hal ini sejalan dengan pandangan Tito Mahmudi et al. (2025) bahwa komitmen perusahaan terhadap kinerja ESG-lah yang pada akhirnya membantu mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, bukan semata-mata karena besarnya proporsi kepemilikan institusional.

Meskipun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Hidayat & Zuhroh (2023) jumlah kepemilikan institusional yang optimal apabila disertai faktor lain, seperti keberadaan direktur perempuan dan ukuran perusahaan, dapat membantu perusahaan menjadi lebih terorganisasi dan efisien dalam pengambilan keputusan sehingga mampu meminimalkan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini

mengindikasikan bahwa efektivitas kepemilikan institusional sebagai mekanisme pengawasan, baik dari sisi keagenan, pemangku kepentingan, maupun legitimasi, kemungkinan besar bersifat kondisional dan bergantung pada faktor-faktor kontekstual lain yang tidak diuji secara langsung dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ditolak.

KESIMPULAN DA SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa secara simultan ESG dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial, ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi ESG belum tentu diikuti dengan penurunan praktik *Tax Avoidance*, sedangkan keberadaan investor institusional belum mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan sektor pertambangan. Dengan demikian, praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan lebih dipengaruhi oleh implementasi ESG dibandingkan oleh mekanisme pengawasan melalui Kepemilikan Institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Fattah, S. Y., & Menezes Montenegro, T. (2026). Integrated Reporting Quality, *Tax Avoidance*, and Sustainable Development: Evidence from South Africa. *International Journal of Financial Studies*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/ijfs14050127>
- Afrika, R., & Author, C. (2021). Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal AKuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131–144. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Amarna, K., López-Pérez, M. V., Garde Sánchez, R., & Rodríguez Ariza, L. (2025). ESG Information Disclosure and Its Relationship to Tax Practices: Stakeholder-Friendly or Legitimacy-Seeking? *Sustainable Development*, 33(3), 3906–3917. <https://doi.org/10.1002/sd.3333>
- Andrianto, A., Aryani, Y. A., Setiawan, D., & Sudaryono, E. A. (2025). *Environmental, Social, and Governance* Pillars And *Tax Avoidance*: a Future Research Agenda in Indonesia. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 243–264. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v8i2.774>
- Ariefiara, D., Widyastuti, S., Masripah, Miftah, M., & Wijaya, S. (2025). The Role of Largest Ownership Structure in ESG Reporting, *Tax Avoidance*, and Firm Value: Evidence from Emerging Markets. *Qubahan Academic Journal*, 5(2), 293–321. <https://doi.org/10.48161/qaj.v5n2a1682>

- Ayundasari, A., & Septiani, D. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Ukuran Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/liabilities.v8i3.26202.g14592>
- Cahyati, A. D., Lestari, T., Mulyasari, W., & Idriana, I. (2023). Environmental disclosure, governance score, and *Tax Avoidance*: Evidence from Indonesian energy sector companies. *International Journal of Management and Sustainability*, 12(4), 488 – 504. <https://doi.org/10.18488/11.v12i4.3525>
- Chen, C., & Li, Y. (2025). The Impact of Institutional Ownership on Corporate *Tax Avoidance* in China: An Empirical Test Using Quantile Regression. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2025(1). <https://doi.org/10.1155/ddns/9924040>
- Dakhli, A. (2022). The Impact of Ownership Structure on Corporate *Tax Avoidance* with Corporate Social Responsibility as Mediating Variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. Bawono. (2022). *Desain sistem perpajakan Indonesia : tinjauan atas konsep dasar dan pengalaman internasional* (Vol. 1). DDTC.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. In *Source: The Pacific Sociological Review* (Vol. 18, Number 1). <https://www.jstor.org/stable/1388226?seq=1&cid=pdf->
- Firmansyah, A., Darmastuti, D., Nugraheni, R., & Swatdikun, T. (2026). The Effect of ESG Performance on *Tax Avoidance*: the Moderating Role of Earnings Management in ASEAN Firms. *Cogent Business and Management*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2635798>
- Freeman, R. E. (1984). *a Stakeholder Approach* (E. M. Epstein, Ed.). Pitman Books Limited. https://www.researchgate.net/publication/228320877_A_Stakeholder_Approach_to_Strategic_Management
- Galuh Adella Lokahita, & Sevty Wahiddirani Saputri. (2024). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 217–229. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3031>
- Global Witness. (2019, July 4). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. Media@globalwitness.Org.
- Hakimah, Y., Ratar, M., Ardan, M., & Setiawan, A. (2024). *Analisis Data Statistik: Panduan Komprehensif untuk Interpretasi Data* (Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on *Tax Avoidance*: Evidence from Indonesia.

- International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311–320.
<https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>
- Huang, K., Li, Y., Oyewale, K., & Tworoger, E. (2025). Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance: Evidence from America's Best Corporate Citizens. *International Journal of Financial Studies*, 13(3).
<https://doi.org/10.3390/ijfs13030119>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Karlinah, Lady, Meutia, Hanifah, I. A., & Ismawati, I. (2024). How does Financial Performance Moderate the Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Avoidance? *Quality - Access to Success*, 25(201), 292–302.
<https://doi.org/10.47750/QAS/25.201.32>
- Khan, M. A., Khusnah, H., & Budianto, R. (2026). Corporate Governance Structures, Tax Avoidance, and Financial Fraud: The Moderating Role of Gender Diversity in Indonesia and Pakistan Non-Financial Firms. *Ianna Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17852299>
- Made Laut Mertha Jaya, I. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata* (F. Husaini, Ed.). Anak Hebat Indonesia.
<https://play.google.com/store/books/details?id=yz8KEAAAQBAJ>
- Mansour, M., & Alomair, M. (2026). Institutional Quality, ESG Performance, and Aggressive Tax Planning in Developing Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 18. <https://doi.org/10.3390/su18021126>
- Mardjono, E. S., Hernawati, R. I., Septriana, I., Nehayati, N., & Fathima. (2024). *Transfer Pricing, Earnings Management, and ESG Strategies for Sustainable Corporate Reporting* (F. Mahmudah, Ed.; 1st ed.). PT Nasya Expanding Management.
<https://play.google.com/books/reader?id=CWNYEQAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>
- Melvin Angelina, & Verani Carolina. (2025). Does ESG Performance Influence Corporate Tax Avoidance? An Empirical Analysis. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 3(4), 1257–1265. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i4.566>
- Menteri Keuangan. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024 Audited*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/LKPP/LKPP-2024.pdf>
- Mitroulia, M., Chytis, E., Kitsantas, T., Skordoulis, M., & Kalantonis, P. (2025). ESG Strategy and Tax Avoidance: Insights from a Meta-Regression Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(9).
<https://doi.org/10.3390/jrfm18090503>
- Mukhtaruddin, M., Verma, M., Novriansa, A., Kalsum, U., Siahaan, H. M. A., & Safitri, R. H. (2026). Tax Avoidance Strategy Of Listed Companies In Asean Stock Exchange. *Corporate and Business Strategy Review*, 7(2), 153–161.
<https://doi.org/10.22495/cbsrv7i2art14>

- Mukhtaruddin, Novriansa, A., & Siahaan, H. M. A. (2025). Environmental, Social and Governance, and *Tax Avoidance*: Study in ASEAN Countries. *Asian Economic and Financial Review*, 15(6), 996–1010. <https://doi.org/10.55493/5002.v15i6.5458>
- Mukhtaruddin, Siahaan, H. M. A., Novriansa, A., & Kalsum, U. (2025). *Tax Avoidance* Practices in ASEAN Countries: Effect of *Environmental, Social, and Governance*, and Capital Intensity. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 12(6), 544–554. <https://doi.org/10.14419/39pfp286>
- Mukhtaruddin, Susanto, H., Rahmah, S. M., Saftiana, Y., & Kalsum, U. (2024). *Tax Avoidance* practices: Effect of *Environmental, Social, and Governance*, earning management, and company size as moderating variable (Study on LQ45 companies listed in Indonesia stock exchange). *Asian Economic and Financial Review*, 14(2), 127–142. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i2.5010>
- Mukhtaruddin, Tanujaya, J., & Kalsum, U. (2025). Transfer Pricing and *Tax Avoidance*: A Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 12(2), 194–202. <https://doi.org/10.14419/5fxgv314>
- Okuyama, A., Tsugawa, S., Matsunaga, C., & Managi, S. (2025). Companies Adjust Tax Payments to Offset Changes in Publicly Perceived Impact on Environment, Social, and Governance Factors. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04199-4>
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri: Analisis Regresi Linier dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel dengan EViews* (1st ed.). Cahaya Harapan.
- Reed, W. R., & Ye, H. (2011). Which Panel Data Estimator Should I Use? *Applied Economics*, 43(8), 985–1000. <https://doi.org/10.1080/00036840802600087>
- Rosmaryam, R., Mursalim, M., & Tjan, J. S. (2026). Kinerja Environmental, Social, dan Governance (ESG) dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Institusi di ASEAN. *Owner*, 10(2), 1775–1792. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i2.3320>
- Sari, D., & Riantida Simamora, L. (2025). Kepemilikan Institusional, Kompetensi CFO, Ketidakpastian Lingkungan dan Penghindaran Pajak. *Owner*, 9(1), 606–622. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2446>
- Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2024). Exploring the intricacies of tax planning: a novel insight from the Indonesian context. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2348709>
- Sastroredjo, P. E., Ausloos, M., & Khrennikova, P. (2025). Environmental Performance, Financial Constraints, and *Tax Avoidance* Practices: Insights from FTSE All-Share Companies. *Entropy*, 27(1). <https://doi.org/10.3390/e27010089>
- Soesetio, Y. (2025). Corporate Characteristics and *Tax Avoidance*: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Scientific Research, Education and Technology*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.58526/jsret.v4i3.857>
- Sopiyana, M. (2022). The Effect Of Leverage And Firm Size On *Tax Avoidance* With Profitability As Moderating. *Scientific Journal of Reflection: Economic*,

- Accounting, Management and Business*, 5, 29–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.422>
- Suleman, N. (2022). *Perilaku Penghindaran Pajak (Pendekatan Spiritual dan Tingkat Pendidikan)* (N. L. H. Sholehah, Ed.; 1st ed.). Cahaya Arsh Publisher.
<https://play.google.com/books/reader?id=kJymEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>
- Sulistiyani, D. E., & Rizkyana, F. W. (2025). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 783–793.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3362>
- Suripno. (2025). *Sustainability dan ESG, Strategi Implementasi di Korporasi* (N. Utami, Ed.; 1st ed.). CV Detak Pustaka.
<https://play.google.com/books/reader?id=7JBJEQAAQBAJ&pg=GBS.PR2&hl=id>
- Tarmidi, D., Paulus, H., Hidayah, N., & Muhyarsyah. (2026). Financial, Responsibility, And The Environment: Unpacking The Drivers Of Corporate *Tax Avoidance*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v16i2.43948>
- Tax Justice Network. (2025). *State of Tax Justice 2025*.
<https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2025/>
- Tito Mahmudi, T. M., Dian Widiyati, D. W., & Priyanto, P. (2025). Systematic Literature Review: The Influence of Environment, Social, and Governance on *Tax Avoidance*. *Journal of Business and Management Review*, 6(5), 496–515.
<https://doi.org/10.47153/jbmr.v6i5.1430>
- Velte, P. (2026). Corporate Social Responsibility (CSR) and *Tax Avoidance*: A Literature Review on Contextual Factors. In *Sustainable Development*. John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/sd.70812>
- Widnyana, I. W., & Wiksuana, I. G. B. (2025). *Arsitektur Keuangan Perusahaan Dan Keberlanjutan Keuangan* (N. Purnama, Ed.; 1st ed.). CV. Mega Press Nusantara.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). *Penghindaran Pajak: Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusion* (1st ed.). Guepedia.
<https://play.google.com/books/reader?id=6VhHEAAAQBAJ&pg=GBS.PA2&hl=id>
- Wilda, F., Supriyati, ., Murdiawati, D., & Prananjaya, K. P. (2023). Determinants of *Tax Avoidance* and the Moderation Role of Asset Growth: A Case of Southeast Asia Banking Industry. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 231–248.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24815/jdab.v10i2.25717>
- Wulandari, T., Prastiwi, A., & Atmini, S. (2022). Penghindaran Pajak: Apakah Perusahaan Yang Bertanggung Jawab Secara Sosial Patuh Terhadap Pajak? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 560–577.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22361>
- Yeni, F., Hady, H., & Elfiswandi. (2024). *Nilai Perusahaan Berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan: V* (M. A. Wardana, Ed.). CV. Intelektual Manifes Media.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 10 (2026) 4772 – 4786 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i10.13343

Yulistia, R. M., Frinola Minovia, A., & Fauziati, P. (2020). Ownership Structure, Political Connection and Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 11.
https://www.ijicc.net/images/vol11iss12/111234_M_2020_E_R.pdf